

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah negara, terdapat berbagai faksi Islam dan organisasi sosial keagamaan di kalangan umat Islam. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan tokoh yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan politik nasional secara umum. Pasca runtuhnya Orde Baru, muncul bermacam aksi atau gerakan Islam yang mengangkat topik, wacana, dan program aksi pergerakan politik dalam suasana kebebasan berpendapat atau berekspresi, yang mencerminkan nilai-nilai moral. Tuntutan tersebut telah menjadi topik perbincangan utama antara Muslim Indonesia yang berprofesi sebagai politisi di Partai Politik dan Muslim Indonesia yang berprofesi sebagai Ormas Islam yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat sipil.

Fenomena meningkatnya eksistensi Ormas Islam mulai terlihat pasca tumbanganya Orde Baru, contohnya seperti munculnya Hizbut Tahrir (HT) sebagai Organisasi Masyarakat Islam pada masa itu. Fenomena ini sangat menarik untuk diperbincangkan, karenanya mereka memiliki cara yang berbeda dan menarik dalam menyampaikan pandangan atau aspirasi politik Islam keislaman mereka terhadap publik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jonkennedi, 'GERAKAN HIZBUT TAHRIR DAN RAELITAS POLITIK ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA', Vol.6 No.1 (2012).

Pada tahun 1982 Hizbut Tahrir mulai di perkenalkan ke publik Indonesia melalui Ketua HT Australia Abdul Rahman al-Baghdadi. Beliau dipindahkan ke Bogor sebagai kepala Pesantren Al-Ghazali di Bogor atas permintaan KH Abdullah bin Nuh.<sup>2</sup> Berkat peran besar Al-Baghdadi, Hizbut Tahrir mulai berkembang di berbagai wilayah Indonesia.

Bahkan, gerakan paham Hizbut Tahrir ini mulai populer di berbagai kampus di Indonesia. Alhasil, HTI mulai beranggotakan kalangan intelektual, termasuk akademisi dan mahasiswa. Namun, keberadaan era Orde Baru berfungsi secara rahasia karena penindasan rezim yang otoriter.<sup>3</sup> Barulah setelah orde reformasi, Hizbut Tahrir Indonesia mendapatkan keuntungan dari terbukanya keran kehidupan demokrasi.<sup>4</sup>



---

<sup>2</sup> D. Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy*. In *International Journal of Accounting Information Systems* (Routledge: Transcending the state, 2015).

<sup>3</sup> F. A. Arifan, 'Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia', *Studi Sosial*, 6(2) (2014), 94–102.

<sup>4</sup> M. Taufiq Rahman Setia, Paelani, 'Kekhilafahan Islam, Globalisasi Dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia', *Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, Volume 9 N (2021), 241–64 <<https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.11603>>.

Kemudian, pada tahun 1990-an, Hizbut Tahrir mulai eksis dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Banten. Namun, Banten belum memiliki Hizbut Tahrir hingga tahun 2000-an. Aktivis Hizbut Tahrir didatangkan ke Banten dari Bogor berdasarkan tuntutan kerja, penelitian dan tentunya gerakan dakwah itu sendiri yang dilakukan. Hizbut Tahrir Banten pertama kali didatangkan dari Ustadz. Irlandia Adhi M. Harapan, kemudian pada tahun 2000-an Hizbut Tahrir diluncurkan ke ruang publik,

Munculnya Hizbut Tahrir memiliki gagasan yang kuat untuk menyelamatkan umat Islam dari kehancuran dengan memulihkan iman pada semua konsep dan hukum Islam sebagai konsep yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selain menjadi konsep yang berguna, ia mendamaikan fenomena dan peristiwa dengan kebenaran yang dikandungnya. Artinya, menyebar melalui hukum Islam, yang menyertai politik dalam membentuk kekuatan Islam, dan dalam kegagalan rezim yang hanya berjanji untuk mewujudkan keadilan. Akses ekonomi politik semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Sebaliknya, mereka terperosok dalam korupsi, kolusi dan nepotisme, meninggalkan nasib jutaan orang dalam prasangka dan ketidakpastian. Dalam konteks ini, HTI mengadvokasi khilafah dan penerapan syariat Islam. Sistem ini ditawarkan untuk menggantikan sistem demokrasi yang dianggap sekuler. Sistem ini rentan dimanipulasi dan disalahgunakan oleh segelintir elit untuk kepentingan penguasa.

Khilafah dianggap sebagai institusi suci dan transendental. Dalam logika HTI, kekudusan dan transendensi semacam itu menutup kemungkinan manipulasi kekuasaan. Kehadiran campur tangan ilahi diharapkan dapat menghapus sistem kekuasaan politik sekuler yang manipulatif. Otoritas dan intervensi ilahi diyakini dapat mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi.

Hizbut Tahrir menggambarkan dirinya sebagai partai politik dengan berideologikan Islam. Politik adalah aktivitas, dan Islam sebagai ideologi. Hizbut Tahrir didirikan untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Apa yang benar dan apa yang dilarang dari salah. mereka adalah orang-orang yang beruntung.<sup>5</sup>

Hizbut Tahrir memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat serius, dengan membebaskan mereka dari ideologi sistem hukum serta hukum kekufuran, dan membebaskan mereka dari kekuasaan Dominasi dan Pengaruh Negara. Hizbut Tahrir juga memiliki maksud untuk membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di seluruh dunia agar hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT kembali ditegakkan. HTI sebagai bagian dari Hizbut Tahrir juga memimpin pergerakan politik Islam, memperjuangkan diterapkannya Syariah dan penegakan sistem Khilafah Islamiyah dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an, *Surat Ali Imran: 10*.

Kelompok ini secara keseluruhan tergabung dalam Salafisme radikal dan berusaha memulihkan komunitas Salaf (generasi Nabi Muhammad dan rekan-rekannya) dengan cara yang keras serta radikal. Bagi mereka, Islam pada masa Salaf adalah masa Islam yang paling sempurna, masih suci dan bersih, tanpa berbagai bahan tambahan dan percampuran (bid'ah) yang dianggap mencemari Islam. Radikalisme agama-historis ini diperkuat dengan pemahaman literal terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadits.

Di bidang pergerakan Islam radikal pada umumnya, Hizbut Tahrir dan HTI adalah pendukung Sistem Politik Islam yang ideal, yaitu Khilafah Islamiyyah. Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin (IM), Mereka meremehkan idealisme ini dengan berjuang untuk berdirinya sistem negara Islam modern dalam kerangka *Nation-state* atau negara-bangsa. Sedangkan Khilafah Islamiyyah membutuhkan seluruh pemerintahan Islam. Di sisi lain, Negara Islam merupakan adaptasi dari sistem negara-bangsa atau yang konstitusinya didasarkan pada Islam. Pendukung khilafah menentang negara modern dan sistem politiknya, yaitu demokrasi, sedangkan IM mendukung negara-bangsa serta dengan demikian ingin terlibat dan ikut andil dalam proses pengelolaan negara yang demokratis.

Penemuan keadilan oleh wakil rakyat, bukan berdasarkan Al-Qur'an atau Hadits, secara teknis disebut “kedaulatan di tangan rakyat”, Ini merupakan salah satu bagian dari sistem demokrasi sekuler barat. Sistem ini menjadikan rakyat atau wakilnya menjadi sumber hukum dan sekaligus berhak untuk terlibat dalam membuat undang-undang. Dalam sistem seperti itu, Syariat Islam hanyalah sebuah pilihan untuk dipilih atau tidak. Diduga, Syariat Islam adalah kewajiban dan satu-satunya pilihan untuk menetapkan hukum, bukan pilihan.

Ismail Yusanto sebagai juru bicara Hizbut Tahrir (HTI) melaranga keras berlakunya kedaulatan rakyat terhadap sistem demokrasi untuk mengubah wakil rakyat menjadi legislator. Hal ini berbeda dengan sistem Islam (nizam al-Islami), yang untuknya Syariah adalah dasar pokok dari formasi hukum yang merupakan penegakan kedaulatan Allah SWT.<sup>6</sup> Dalam demokrasi, Syariah pada akhirnya menjadi pilihan. Ini adalah merupakan keputusan yang mungkin atau mungkin tidak dibuat tergantung pada persetujuan suara mayoritas di Kongres. Mungkin Syariah telah menjadi kewajiban, kewajiban utama dan satu-satunya pilihan hukum yang ditegakkan oleh pemerintahan Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Aziz, *Islam versus Demokrasi, Menguak Mitos, Menemukan Solusi* (Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri, 2016).

<sup>7</sup> Sayed Khatab, *Democracy in Islam* (London and New York: Routledge, 2007).

Khilafah adalah merek dagang dari pergerakan Organisasi HTI. Dari berbagai wilayah, aktivis HTI memiliki suara dalam membela paham Khilafah. Sehubungan dengan pemulihan Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir melakukan beberapa bentuk kegiatan politik yang disebut kegiatan dakwah siyasi. Kisah Peperangan Nabi SAW. Di masa lalu, itu digunakan sebagai pembenaran untuk klasifikasi siklus dan bertahap atas rangkaian kegiatan dakwah Hizbut Tahrir di berbagai negara. Tahapannya didasari oleh periodisasi yang digunakan sebagai petunjuk atau thariqah dalam metode dakwah.<sup>8</sup>

Pandangan HTI terhadap diterapkannya Syariah yang didasari pada kritik terhadap demokrasi. Hal itu telah disampaikan melalui juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto. Ia mengkritik tentang kedaulatan didalam sistem demokrasi yang tidak mengutamakan kedaulatan Tuhan (hakimiyyatullah) sebagai acuan utama politik, namun justru menjadikan keutamaan atas kedaulatan rakyat yang menjadi acuan utama sistem politik. Otoritas demokrasi ini telah mengasingkan Syariat Islam dari keharusan untuk menegakkannya.

Dalam hal ini, menurut Ismail Yusant dan HTI digambarkan sebagai 'alternatif Islam', yang berasal dari paham 'totalitarianisme syariah'. Pemahaman ini melihat sistem Barat ini sebagai sistem “kebodohan modern” dan karenanya meyakini kapasitas Islam sebagai alternatif sistem sosial-politik modern yang dianggap Jahiliyah.

---

<sup>8</sup> Arifan.

Karena modernisasi dianggap telah menghancurkan peran Islam di ruang publik. Sistem "kebodohan modern" inilah yang telah menciptakan krisis ekonomi, moral, agama dan politik yang multi-faceted, dan HTI, sebagai jalan keluar dari sistem penyampaian kebodohan modern, ialah Islam, atau tepatnya, sistem Islam sebagai solusi bagi sistem sosial-politik yang dianggap jahiliyah ini.<sup>9</sup>

Keberadaan HTI tampaknya menjadi kontroversi di Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan keberadaan organisasi HTI tidak terdaftar di menteri dalam negeri. Namun terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan menganut ideologi Pancasila. Tapi HTI meneriakkan anti Pancasila. Dalam hal ini, pemerintah dapat mencabut izin HTI sebagai organisasi yang terdaftar di Indonesia.

Bahkan, yang paling mencolok terlihat ketika aktivis HTI mendesak dialog, membagikan pamflet untuk mendekati Kiai dan mengajak mereka ke ide khilafah yang telah dijelaskan di sampaikan sebelumnya. Kedua, HTI memprovokasi bahwa apa yang mereka perjuangkan benar-benar dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Karena perjuangan kekhalifahan pada dasarnya bukan milik HTI, tapi fundamental bagi seluruh umat Islam, ia mengatakan bahwa ia dianggap sebagai saudara dari orang beriman yang menjadi bahan khotbahnya tentang sistem tersebut.

---

<sup>9</sup> Syaiful Arif, 'PANDANGAN DAN PERJUANGAN IDEOLOGIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DALAM SISTEM KENEGARAAN DI INDONESIA', Vol. 7 No. (2016) (file:///C:/Users/qisth/Downloads/1282-2980-1-SM (1).pdf).



Aktivis HTI Jombang juga mengatakan bahwa HTI memiliki istilah *Tabbani*. Ini adalah seperangkat ajaran sistematis tertentu yang ditentukan oleh kebijakan organisasi yang mempengaruhi masalah iman dan pemikiran, terutama masalah ekonomi dan politik. Itu hukum yang harus dipatuhi. Namun, dalam hal ibadah, HTI tidak menetapkan bahwa setiap anggota memilih aliran Islam tertentu. Fleksibilitas dalam menetapkan tata cara peribadatan dan ekspresi Islam di luar wilayah ideologi telah memungkinkan HTI untuk beradaptasi dengan berbagai sekte dalam Islam. Namun harus ditegaskan bahwa dasar pemikiran HTI terkait komitmennya memperjuangkan Khilafah tetap tidak berubah.

Gagasan khilafah yang mendasari perjuangan identitas HTI dilanggengkan di Jombang. Namun, sebagai bagian dari fleksibilitas dalam ekspresi keagamaan dan peningkatan citra identitas seperti Muslim, HTI Jombang telah melakukan banyak upaya untuk menyesuaikan karakteristik yang berada di bawah Nahdliyin. Politik Identitas Islamis yang dilakukan HTI pada awalnya menggunakan framing identitas entitas Muslim.

Selanjutnya, identitas ummat diterapkan dalam konteks komunitas Nahdriyin Jombang dengan mencocokkannya dengan pemahaman agama dan budaya yang ada di kalangan Nahdriyin. Puncak dari semua ini membuat HTI tidak sejalan dengan politik identitas Islamis, yang menganjurkan pembentukan khilafah global. Adaptasi HTI ini merupakan bagian dari upaya HTI merangkul naphdolin dan bergabung dengan gerakan HTI sejati. Alasan lain menyebutkan diadopsinya HTI tentu saja tidak lepas dari perbedaan pemahaman agama dan politik NU.

Penyesuaian ini membantu mencegah NU menolak keras HTI karena mereka beberapa kali menolak sekitar HTI di Jombang melalui Ansor. Misalnya, melobi pemerintah untuk membubarkan atau menolak aktivitas tokoh agama lokal di Provinsi Jombang. Dan banyak keberatan lainnya.<sup>10</sup>

Mengenai gerakan radikal, banyak umat Islam yang tidak setuju atau tidak senang dengan gerakan radikal tersebut, baik secara individu maupun organisasi. Pada tataran Ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama merupakan kelompok Islam moderat. Secara lebih khusus, dalam penelitian ini, penulis ingin mencari jawaban dari kedua organisasi Islam moderat tersebut, yang tidak lain adalah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Elit Muhammadiyah Indonesia yang memegang jabatan resmi di organisasi cenderung menunjukkan perilaku dan kemampuan beradaptasi yang moderat. Selain model yang adaptif secara umum, juga terdapat kecenderungan perilaku elite yang pragmatis dan idealis, namun tetap moderat. Elit politik tidak cenderung radikal dengan model oposisi dan revolusioner.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dian Dwi Jayanto, 'Manifestasi Politik Identitas HTI Di Kalangan Nadlly: Studi Kasus HTI Di Kabupaten Jombang' <[https://repository.unair.ac.id/70392/3/JURNAL\\_Fis.P.02\\_18\\_Jay\\_m.pdf](https://repository.unair.ac.id/70392/3/JURNAL_Fis.P.02_18_Jay_m.pdf)>.

<sup>11</sup> Fauzi Hadi Luzia, 'Respon Elit Muhammadiyah Terhadap Gerakan Islam Radikal Di Kota Makassar', 2016, 6.

Menanggapi sikap tidak saling menghargai serta Terorisme di Indonesia, Prof. Dr. Kiyai Haji Said Aqil Sirad, M.A, sebagai presiden Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendorong seluruh masyarakat Indonesia agar bisa menghormati seluruh keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Dari keberagaman tersebutlah yang menjadikan Indonesia sebagai negara bangsa, bukan negara agama, dengan ini dapat kita simpulkan NU merupakan Organisasi Masyarakat Keagamaan yang menganggap Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. Mereka juga menunjukkan dalam usaha memperkuat nasionalisme dan kerukunan umat beragama di Indonesia.<sup>12</sup>

Moderasi keislaman yang ditunjukkan oleh kedua ormas ini setidaknya terlihat dari keyakinan agama yang dianut oleh Muhammadiyah dan NU. Dalam bidang teologi, kedua ormas ini mengaku sebagai pengikut ahlussunah wal jama'ah (Aswaja). Dalam kajian aliran ilmu kalam (teologi), aswaja dikenal sebagai paham yang berada di antara dua ekstremitas paham Muktazilah dan Khawarij, antara Qadariyah dan Jabbariyah.

---

<sup>12</sup> Dwi Ratnasari, 'Fundamentalisme Islam', *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol.4 No.1.1978-126 (2010), 7.

Golongan Muktazilah dan Qadariyah bercirikan rasionalis dan liberal, sedangkan golongan Khawarij dan Jabbariyah bercirikan golongan tradisional dan sastrawan. Dalam bidang fikih, NU mendukung mazhab Syafi'i sebagai acuan ajaran agamanya, namun Muhammadiyah lebih memilih untuk tidak mendukung mazhab fikih yang sudah ada. Sikap ini bukannya berarti mencitrakan Muhammadiyah sebagai gerakan anti Mazhab, tetapi lebih menegaskan mendapatkan referensi yang lebih luas dan kredibel langsung dari sumber al-Qur'an dan al-Sunah al-Maqbullah. perbedaan aliran, tetapi juga idealisasi generasi awal Islam sebagai generasi unggul.<sup>13</sup>

Sikap Tawassuth yang ditampilkan oleh Muhammadiyah, NU dan lainnya juga tampak dalam pandangan politik mereka. Diskresi, fleksibilitas dan moderasi adalah tiga prinsip yang sering disebut sebagai dasar pengambilan kebijakan Politik NU. Tradisi memilih jalan damai dalam wacana politik NU umumnya berpijak pada prinsip dan aturan fikih yang menganjurkan minimalisasi risiko, mengutamakan utilitas, dan menghindari hal-hal ekstrem dan lebih menggambarkan pragmatisme politik ketimbang sikap idealis.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> A. S. Ma'arif, 'Tinjauan Teologis, Dalam Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah Pada Era Multiperadaban', 1995, 133.

<sup>14</sup> G. Fealy, 'Islamic Radicalism in Indonesia; the Faltering Revival. (Institute of Southeast Asian Studies).', 2004, 69.

HTI tidak hanya memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, tetapi juga melakukan tuntutan lebih kompleks, seperti pembentukan Khilafah Islamiyyah, yang bertujuan untuk menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu negara Khilafah. Karena HTI adalah bagian dari Hizbut Tahrir yang memiliki jaringan internasional, HTI berkesimpulan mencari sesuatu yang bisa dipahami. Khilafa Islamiyah sendiri bertentangan dengan paham nasionalis tentang negara kesatuan dalam NKRI. HTI juga merupakan salah satu organisasi keagamaan populer yang tidak mau memasukkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam organisasinya.<sup>15</sup>

Seperti di daerah lain, kegiatan HTI di Kabupaten Jember menuai reaksi negatif dari beberapa oknum yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Anshor Jember. Seperti diberitakan beberapa media, Gerakan Pemuda Anshor Jember membubarkan Kongres Pimpinan HTI Jember. Sebab, dalam pertemuan itu menjadi jelas bahwa HTI sedang mengusung konsep khilafah (negara Islam). 3 Kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Gerakan Pemuda Anshor di tingkat eksekutif dan legislatif. Akibatnya, banyak anggota DPRD Jember yang tidak mengambil tindakan terhadap kegiatan yang dianggap merugikan NKRI, dan posisi bupati Faida yang diyakini tidak menerima Pancasila itu dipertanyakan.

---

<sup>15</sup> zudi Setiawan, 'RELASI PENERIMAAN PANCASILA OLEH ORMAS KEAGAMAAN TERHADAP PENGOKOHAN NASIONALISME DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia)'.

Sejumlah kelompok Islam, anggota Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), telah meminta pemerintah Joko Widodo untuk segera melaksanakan rencananya untuk membubarkan HTI sebagai organisasi massa radikal anti-Pancasila. Jika kita membiarkan keberadaan HTI di Indonesia berkembang, itu akan menjadi kontroversi lain bagi kebhinekaan Indonesia. Oleh karena itu, LPOI akan segera memenuhi janjinya untuk menindak ormas anti-Pancasila seperti HTI, mendesak pemerintah untuk melakukannya.

Dan segera pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas dan mengambil tindakan tegas terhadap Ormas yang telah merusak Pancasila dan UUD 1945. MUI mendukung pembubaran ormas penentang Pancasila. Dalam hal ini, MUI sudah lama menangani masalah HTI. Sikap ulama di Indonesia pun dengan tegas mengingkari keberadaan HTI.

Pemerintah telah mengeluarkan SK pengganti UU No 2 Tahun 2017 menggantikan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penyampaian Perppu secara resmi diumumkan pada 12 Juli 2017 oleh Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers di kantornya.<sup>16</sup> Beliau menjelaskan, Perppu tersebut dikeluarkan presiden pada 10 Juli 2017, atau dua hari sebelumnya. Wiranto menjelaskan, alasan dikeluarkannya Perppu adalah banyak Ormas di Indonesia yang perlu didorong, terutama yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>16</sup> Dewi Irmasari, 'Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu 2/2017 Soal Ormas', 2017.

Mahdud MD, selaku anggota Dewan Pengarah Partai Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), membela mendukung terhadap pentingnya pemerintah mengeluarkan perppu, Menurutnya, kelompok dan organisasi radikal kini lebih besar dan terstruktur lebih baik. Kelompok ini berupaya mengubah dasar pemerintahan dan konstitusi dengan cara yang tidak sesuai dengan proses hukum. Pemerintah ingin memerangi kelompok-kelompok ini. Dengan Perppu Ormas ini, pemerintah ingin membatasi mekanisme yang diatur dalam UU Ormas lama.<sup>17</sup>

Dengan demikian, Hizbut Tahrir menunjukkan bahwa radikalisme Islam ialah merupakan bagian dari kekuatan globalisasi yang menantang keberadaan sistem negara-bangsa melalui pengejaran kewarganegaraan dunia. Utopis atau tidak, Hizbut Tahrir merupakan fenomena globalisasi yang menafsirkan kembali agama-agama dunia lama, menyangkal legitimasi negara-bangsa dan memperkuat tujuan kelompok dunia yang dibayangkan oleh para pendukung universalisme. mendominasi masyarakat Islam kontemporer.<sup>18</sup>

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak transparan dan tidak berdasarkan negara hukum. Pemerintah diyakini belum pernah melakukan dialog terkait dengan pembubaran HTI.

---

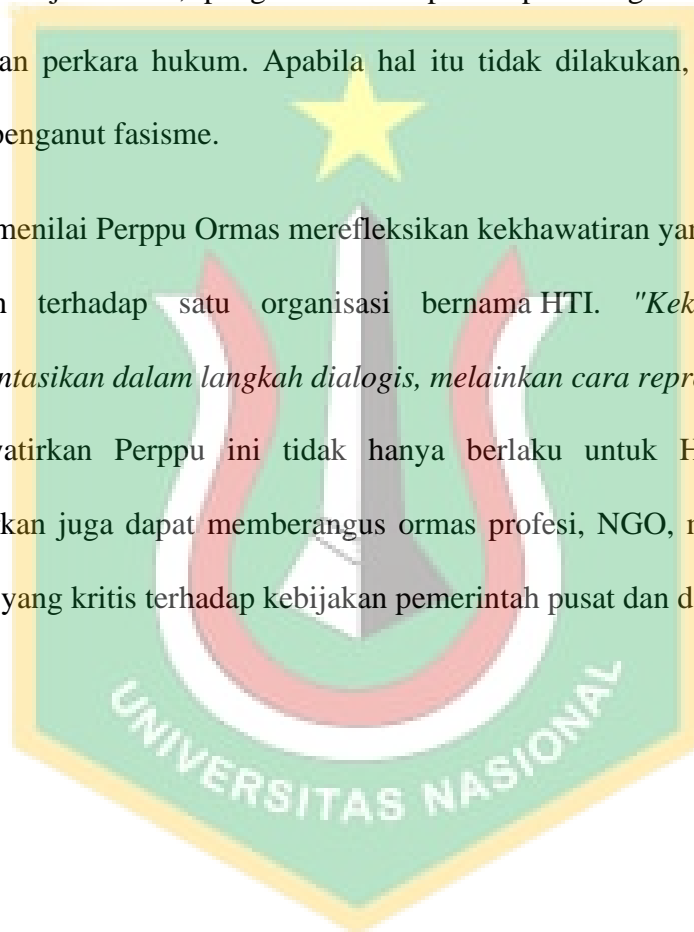
<sup>17</sup> Hendra Gunawan, 'Mahfud MD Jelaskan Soal Perppu Ormas', 2017.

<sup>18</sup> Setia, Paelani.

*"Pembubaran HTI dicabut badan hukumnya, apakah pemerintah pernah dialog? Apakah Menteri Agama pernah mendiskusikan ke media soal ideologi HTI yang kalau tidak sesuai Pancasila seharusnya dibubarkan di pengadilan,"*

Seharusnya, Jika terjadi persoalan ataupun permasalahan dapat diselesaikan melalui pengadilan dan bukan secara sepihak yang hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Sebab, pengadilan merupakan pilar negara yang berwenang merumuskan perkara hukum. Apabila hal itu tidak dilakukan, pemerintah akan dianggap penganut fasisme.

Ia menilai Perppu Ormas merefleksikan kekhawatiran yang berlebihan dari pemerintah terhadap satu organisasi bernama HTI. *"Kekhawatiran tidak diimplementasikan dalam langkah dialogis, melainkan cara represif,"* Busyro juga mengkhawatirkan Perppu ini tidak hanya berlaku untuk HTI saja, namun dikhawatirkan juga dapat memberangus ormas profesi, NGO, media, dan ormas non-Islam yang kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Switzy Sabandar, 'Pandangan Tokoh Muhammadiyah Soal Pembubaran HTI', 2017.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun perumusan masalah guna memudahkan dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini. Dalam perumusan proposal ini, penulis ingin menjelaskan awal mula Hizbut Tahrir (HT) ada dan menampakan eksistensinya di Indonesia demi menjalankan ideologi demokrasi yang mereka pahami hingga penyebaran paham Hizbut Tahrir dianggap radikal dan bertentangan dengan ideologi pancasila, sehingga timbul banyak pertentangan yang dilancarkan oleh berbagai organisasi islam maupun nasionalis di Indonesia. Sehingga memicu pemerintahan untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir tidak terhormat karena di anggap membahayakan ideologi Indonesia. Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang penting untuk di jawab, sehingga penelitian secara mendalam, menjawab pertanyaan ;

- 1.2.1 Seperti Apa Saja Gejala Yang Menggambarkan HTI Mendapatkan Resistensi Sebagai Organisasi Umat Islam ?
- 1.2.2 Apa alasan HTI Dibubarkan oleh Pemerintah Jokowi ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki tujuan, sama halnya dengan penulisan proposal penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1.3.1.1 Untuk Mengetahui Apa saja Gejala Yang Menggambarkan HTI Mendapatkan Resistensi Sebagai Organisasi Umat Islam

1.3.1.2 Untuk Mengetahui Apa alasan HTI Dibubarkan oleh Pemerintah Jokowi

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Literatur**

Secara literatur, Penelitian ini dibuat agar dapat menambah pengetahuan tentang pemikiran politik Islam yang berhubungan dengan masuknya organisasi islam dunia yaitu Hizbut Tahrir, dengan upaya mengubah ideologi demokrasi menjadi ideologi syariat islam.

#### **1.3.2.2 Manfaat Empiris**

Secara empiris, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi fakultas dan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik Universitas Nasioanal terkait fenomena hadirnya Hizbut Tahrir dalam problematika ideologi politik Indonesia.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Proposal Penelitian ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian terdahulu dan kerangka teori.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB 4 DATA KASUS**

Bab ini berisi hasil temuan data yang berhubungan dengan kasus yang dipilih

### **BAB 5 ANALISIS DATA KASUS**

Bab ini analisis dari data kasus yang disajikan

### **BAB 6 PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh isi proposal skripsi ini dan saran terkait pembahasan

